

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia, pemerintah telah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Selain yang difokuskan pada sektor ekonomi, pemerintah juga menggenjot pembangunan di bidang kesehatan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah dengan mendirikan puskesmas, apotek, rumah sakit, dan infrastruktur pendukung lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perubahan yang semakin pesat membuat semakin memahami pengetahuan kesehatan manusia, yang menjadikan puskesmas sebagai institusi medis yang selalu berusaha memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik.

Puskesmas mempunyai kegiatan menjual jasa pelayanan dan perawatan namun pelayanan dan perawatan terhadap pasien tidak akan maksimal jika persediaan dalam puskesmas tersebut tidak ada. Persediaan di puskesmas memiliki peran sangat penting karena persediaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan puskesmas. Persediaan merupakan faktor penting dalam industri, jasa, dagang atau perusahaan manufaktur. Persediaan biasanya membuat sebagian besar total aset lancar dari perusahaan. Namun, jumlah dan presentase bervariasi dari satu instansi dengan instansi yang lain.

Puskesmas perlu menjaga keseimbangan persediaan agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Persediaan yang terlalu rendah akan menimbulkan terhambatnya pendistribusian obat kepada pasien, sebaliknya persediaan yang terlalu tinggi akan menyebabkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan persediaan di puskesmas meningkat (Muthi'ah, 2019).

Perputaran persediaan (*inventory turn over*) adalah salah satu indikator kinerja suatu persediaan. Adanya perputaran persediaan ialah untuk membantu instansi dalam melakukan pembelanjaan secara efisien pada proses produksi atau pembelian persediaan dan juga menghemat biaya penyimpanan atau pemeliharaan

persediaan. Pengukuran kinerja persediaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menghitung rasio perputaran persediaan. Menurut Robertson (2002) dalam Komarawati (2011), pengukuran kinerja adalah proses menilai kemajuan pekerjaan untuk tujuan dan sasaran tertentu, termasuk informasi tentang penggunaan sumber daya yang efisien dalam menghasilkan barang dan jasa, juga kualitas barang dan jasa. Peran kinerja persediaan bagi puskesmas salah satunya ialah mengetahui persediaan tersedia di puskesmas guna mendukung kegiatan operasional. Penilaian kinerja persediaan puskesmas dapat dinilai dengan menggunakan rasio keuangan yang diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, mengenai pengaruh *inventory turn over*, *fixed asset turn over*, *return on fixed asset* dan *return on equity* terkait kinerja keuangan BLUD terhadap rencana strategi bisnis Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, menunjukkan bahwa perputaran persediaan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati tahun 2018 dan 2019 mengalami fluktuasi, hal tersebut terlihat dari perputaran persediaan tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan. Disimpulkan bahwa perputaran persediaan pada Puskesmas Kecamatan Kramat Jati masih tergolong kurang efisien karena belum mampu dalam mengelola persediaannya (Ependi dan Dalesna, 2021).

Penelitian oleh Farwitawati (2020), mengenai analisis kinerja keuangan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Bengkalis sebelum dan sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), menyimpulkan bahwa sebelum implementasi PPK-BLUD perputaran persediaan pada RSUD Bengkalis berada di bawah 30 hari pada 3 tahun amatan. Kondisi tersebut memiliki risiko kekurangan persediaan bagi rumah sakit. Hal tersebut dikarenakan rumah sakit belum memiliki pedoman pengelolaan persediaan yang baik. Setelah implementasi PPK-BLUD perputaran persediaan pada RSUD Bengkalis cenderung semakin cepat tiap tahunnya. Hal tersebut berakibat adanya risiko kehabisan persediaan pada rumah sakit.

Penelitian menurut Rochmiatun (2018), terkait analisis perbedaan kinerja keuangan dan kinerja layanan sebelum dan sesudah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) (studi kasus Puskesmas Kota Yogyakarta), menunjukkan bahwa perputaran persediaan di lima puskesmas mendapat skor maksimal dalam rasio perputaran persediaan. Puskesmas sudah efisien dalam mengatur persediaannya baik itu sebelum atau sesudah penerapan PPK BLUD terkhusus untuk persediaan medis yang merupakan persediaan yang vital dalam kegiatan operasional di puskesmas.

Puskesmas KBJ adalah salah satu organisasi kesehatan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat yang mampu menyelesaikan masalah kesehatan, sehingga puskesmas harus mampu memberikan pelayanan medis dalam upaya penyembuhan/pemulihan dan tindakan kecil yang memenuhi standar kualitas. Selama ini Puskesmas KBJ sudah berjalan sesuai dengan peraturan dalam bidang kesehatan yang berlaku di pemerintahan daerah dengan menerapkan sistem BLUD. Dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kegiatan operasional Puskesmas KBJ tidak akan berjalan tanpa adanya persediaan.

Puskesmas KBJ memiliki persediaan berupa persediaan obat dan persediaan alat tulis kantor atau barang habis pakai. Pengadaan persediaan obat Puskesmas KBJ diperoleh dari Dinas Kesehatan dan obat beli sendiri. Untuk obat dari Dinas Kesehatan pihak puskesmas harus memberikan daftar obat yang dibutuhkan, lalu Dinas Kesehatan memberikan obat sesuai dengan permintaan Puskesmas KBJ, tetapi biasanya untuk pengadaan persediaan obat dari Dinas Kesehatan masih belum terpenuhi keseluruhannya atau masih kurang dari jumlah yang diminta dan untuk obat beli sendiri Puskesmas KBJ membeli obat yang masih kurang atau tidak disediakan oleh Dinas Kesehatan. Lalu untuk pengadaan persediaan alat tulis kantor dan barang habis pakai dibeli sendiri oleh Puskesmas KBJ.

Puskesmas KBJ terkadang mengalami kekosongan stok atau kekurangan persediaan obat. Kekosongan atau kekurangan obat di puskesmas tidak boleh terjadi, karena kekosongan atau kekurangan obat di puskesmas dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pasien dan berdampak pada kepuasan pasien terhadap pelayanan puskesmas. Upaya permintaan obat oleh Puskesmas KBJ ke Dinas Kesehatan telah dilakukan tetapi masih belum terpenuhi keseluruhannya. Hal

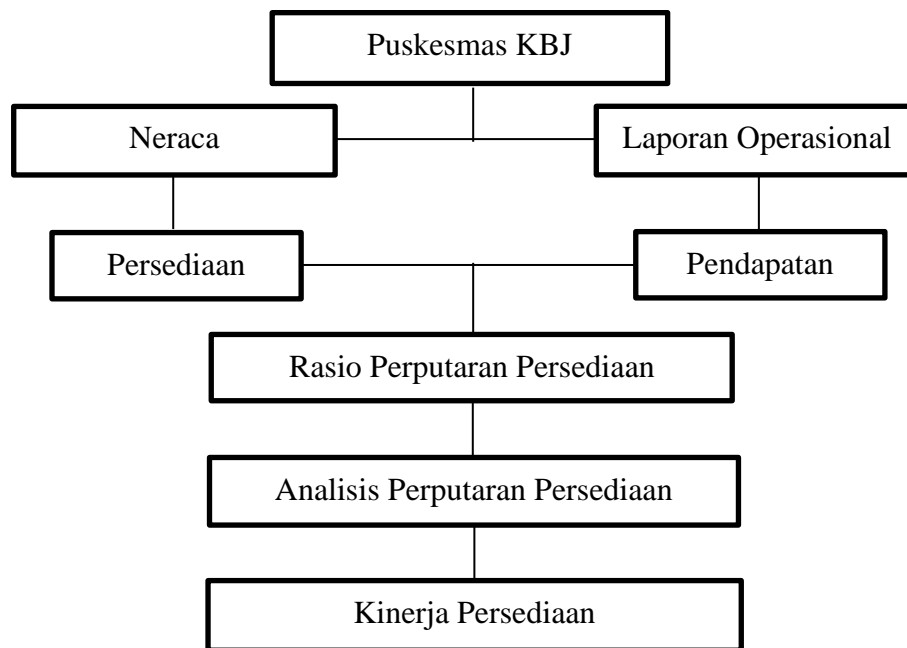
ini dapat mempengaruhi proses kegiatan operasional puskesmas yakni dapat mengakibatkan tidak adanya pendistribusian obat kepada pasien atau pemakaian persediaan dan adanya pemakaian persediaan berpengaruh terhadap pendapatan BLU (Badan Layanan Umum) pada Puskesmas KBJ. Adanya kondisi tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap tingkat perputaran persediaan pada Puskesmas KBJ. Selama ini Puskesmas KBJ belum melakukan perhitungan perputaran persediaannya. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul “Analisis Perputaran Persediaan Pada Puskesmas KBJ Untuk Periode 2019-2021”.

1.2 Tujuan

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan, tujuan disusunnya tugas akhir ini untuk menghitung dan menganalisis rasio perputaran persediaan pada Puskesmas KBJ selama periode 2019-2021.

1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari laporan tugas akhir ini dimulai dari Puskesmas KBJ yang merupakan fasilitas kesehatan masyarakat yang menggunakan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam kebijakan akuntansinya. Puskesmas KBJ memiliki persediaan guna menunjang kegiatan operasionalnya dan Puskesmas KBJ menyajikan persediaan dalam neraca, sedangkan pendapatan disajikan dalam laporan operasional. Dalam kegiatan operasional Puskesmas KBJ dapat mempengaruhi persediaan yang menyebabkan pemakaian persediaan. Pemakaian persediaan pada Puskesmas KBJ menyebabkan timbulnya pendapatan BLU pada Puskesmas KBJ. Hal ini penulis bermaksud menghitung perputaran persediaan Puskesmas KBJ menggunakan rasio perputaran persediaan guna mengetahui kinerja persediaan. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.4 Kontribusi

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Bagi penulis

Tugas akhir ini dapat membuat penulis menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan mengenai analisis perputaran persediaan menggunakan rasio perputaran persediaan (*inventory turn over*).

2. Bagi instansi

Sebagai informasi dan masukan bagi Puskesmas KBJ mengenai pengaruh persediaan terhadap perputaran persediaan sehingga diharapkan hasil dari laporan tugas akhir ini dapat berkontribusi membantu meningkatkan kinerja mengenai pengelolaan persediaan.

3. Bagi pembaca

Sebagai salah satu referensi untuk pembuatan laporan tugas akhir serta dapat memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa lainnya dalam menganalisis perputaran persediaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan yang berisi informasi mengenai keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, dan dipakai untuk mendeskripsikan kinerja perusahaan selama periode tertentu (Sujarweni, 2019). Laporan keuangan sektor publik adalah posisi keuangan krusial yang berdasarkan transaksi-transaksi yang dilakukan dalam organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan juga tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya, didirikan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat (Sujarweni, 2019).

2.1.2 Tujuan laporan keuangan

Tujuan menyusun laporan keuangan merupakan menyediakan informasi keuangan tentang suatu perusahaan pada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan pada pembuatan keputusan-keputusan ekonomi (Sujarweni, 2019). Pada awalnya perusahaan membutuhkan laporan keuangan untuk uji kebenaran keuangan yang masuk dan keluar perusahaan. Laporan keuangan tidak hanya sebagai alat uji kebenaran saja tetapi juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian posisi keuangan perusahaan tersebut, di mana berdasarkan laporan keuangan yang sudah dianalisa, kemudian digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat mendukung keputusan yang akan diambil (Sujarweni, 2019).

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah (Fauziah, 2018). Bagi organisasi pemerintah tujuan laporan keuangan ialah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) juga pengelolaan (*stewardsip*) dan untuk memberikan informasi

yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional (Kawatu, 2019).

2.1.3 Jenis-jenis laporan keuangan

Berikut ini jenis-jenis laporan keuangan pemerintah (Siregar, 2017):

a. Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan laporan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode. Realisasi anggaran adalah pelaksanaan APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan unsur-unsur, seperti pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Laporan saldo anggaran lebih merupakan laporan yang menunjukkan perubahan dan saldo anggaran lebih dalam suatu periode. Saldo anggaran lebih (SAL) adalah sejumlah saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (silpa/sikpa) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan unsur-unsur, seperti saldo anggaran lebih awal periode, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, saldo anggaran lebih akhir periode.

c. Laporan operasional

Laporan operasional (LO) merupakan laporan yang menunjukkan kinerja pemerintah dalam satu periode. Pos-pos yang disajikan pada laporan operasional, seperti pendapatan LO, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, pos luar biasa, surplus/defisit LO.

d. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan unsur-unsur Ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode

bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

e. Neraca

Neraca merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur-unsur yang disajikan dalam neraca, seperti aset, kewajiban, dan ekuitas.

f. Laporan arus kas

Laporan arus kas (LAK) merupakan suatu laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Laporan arus kas menyajikan unsur-unsur, seperti arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas dari aktivitas transitoris.

g. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan (CALK) merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera di dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. CALK juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah dan juga ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.2 Persediaan

Persediaan adalah salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya (Martani, dkk., 2016). Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Fauziah, 2018). Metode penilaian persediaan terdapat MPKP/FIFO (*First In First Out*) yang mengasumsikan barang dalam persediaan yang pertama

dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Lalu metode biaya rata-rata tertimbang (*average*), biaya setiap barang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari barang serupa pada awal periode dan biaya rata-rata serupa yang dibeli atau diproduksi selama periode. Perhitungan rata-rata dapat dilakukan secara berkala, atau pada setiap penerimaan kiriman, tergantung pada keadaan perusahaan. Selanjutnya MTKP/LIFO (*Last In First Out*) yang mengasumsikan barang yang dibeli atau diproduksi terakhir dijual terlebih dahulu, sehingga yang termasuk persediaan akhir ialah yang dibeli atau diproduksi terdahulu (Sulindawati, dkk., 2014). Jika persediaan tidak cukup, volume penjualan akan turun di bawah tingkat yang dapat dicapai. Jika persediaan yang terlalu banyak menghadapkan perusahaan pada biaya penyimpanan, asuransi, pajak, keusangan, dan kerusakan fisik. Persediaan yang terlalu besar juga menahan dana yang dapat digunakan secara lebih menguntungkan di tempat lain. Sebaliknya, jika persediaan tidak cukup, volume penjualan akan turun di bawah tingkat yang harusnya dapat dicapai (Subramanyam dan Wild, 2011).

2.2.1 Sistem pencatatan persediaan

Dalam melakukan pencatatan persediaan, teknis pencatatan persediaan terkait juga dengan sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh entitas. Entitas dapat menggunakan sistem periodik atau sistem perpetual. Sistem periodik merupakan sistem pencatatan persediaan di mana kuantitas persediaan ditentukan secara periodik yaitu hanya pada saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan secara *stock opname*. Sistem perpetual merupakan sistem pencatatan persediaan di mana pencatatan yang *up-to-date* terhadap barang persediaan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan (Martani, dkk., 2016).

2.2.2 Pengakuan persediaan

Suatu persediaan diakui pada saat (Siregar, 2017):

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan kekuasaannya berpindah.

2.2.3 Pengukuran persediaan

Persediaan disajikan sebesar (Siregar, 2017):

- a. Biaya perolehan untuk persediaan yang dibeli.
- b. Harga pokok produksi untuk persediaan yang diproduksi sendiri.
- c. Nilai wajar untuk persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti donasi dan rampasan.

2.2.4 Pengungkapan persediaan

Laporan keuangan mengungkapkan (Fauziah, 2018):

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

2.3 Analisis Rasio Keuangan

2.3.1 Pengertian rasio keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan (Kawatu, 2019). Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode (Kasmir, 2016).

2.3.2 Tujuan analisis rasio keuangan

Tujuan melakukan analisis rasio keuangan adalah untuk dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, menilai kinerja laporan keuangan perusahaan dalam memberdayakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan

(Sujarweni, 2019). Analisis rasio keuangan digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis (Kawatu, 2019).

2.3.3 Metode dan teknik analisis

Ada dua metode yang dapat digunakan dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu analisis horizontal dan vertikal. Analisis horizontal atau disebut pula metode analisis dinamis ialah membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga akan diketahui perkembangannya. Analisis vertikal atau disebut pula metode analisis statis yaitu analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja (Vidada, dkk., 2020).

2.3.4 Rasio perputaran persediaan

Penilaian kinerja persediaan pada puskesmas memiliki peraturan tersendiri yang telah ditetapkan yaitu dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan yang meliputi rumah sakit, balai kesehatan, dan balai laboratorium kesehatan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2018, perputaran persediaan (*inventory turnover*) ialah digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah total persediaan dengan pendapatan usaha. Berikut rumus untuk menghitung perputaran persediaan:

$$\text{Perputaran persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan} \times 365}{\text{Pendapatan BLU}} \times 1 \text{ hari} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- a. Total persediaan ialah seluruh barang persediaan yang dimiliki rumah sakit yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pendapatan BLU terdiri atas pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak ada

hubungannya secara langsung dengan pelayanan BLU, termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.

Rasio perputaran persediaan dapat dikatakan ideal jika berada di antara 30-35 hari, maka skor untuk rasio perputaran persediaan adalah 2. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2018, berikut merupakan skor rasio perputaran persediaan:

Tabel 1. Skor Rasio Perputaran Persediaan

Perputaran persediaan (hari) (PP)	Skor
$PP > 60$	0
$55 < PP \leq 60$	0,5
$45 < PP \leq 55$	1
$35 < PP \leq 45$	1,5
$30 < PP \leq 35$	2
$25 < PP \leq 30$	1,5
$15 < PP \leq 25$	1
$5 < PP \leq 15$	0,5
$0 < PP \leq 5$	0